

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor utama yang menjadi penyebab adanya ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia adalah pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, Sanitasi, dan tentu saja listrik sebagai penyedia energi utama dalam aktivitas keseharian masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi tugas utama dari pemerintah untuk mempersempit jurang antar golongan masyarakat dengan cara menyediakan akses terhadap berbagai fasilitas, seperti listrik untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Indonesia memiliki perusahaan yang bergerak di bidang tenaga pembangkit listrik, salah satu yang terbesar adalah PT PLN Persero yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Segala kehidupan di dunia ini sangat membutuhkan listrik. Listrik merupakan sumber utama pada masyarakat saat ini karena jika tidak ada listrik mungkin sebagian masyarakat tidak dapat beraktifitas seperti biasa.

Listrik sekarang telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena hampir setiap aktivitas masyarakat sangat tergantung pada ketersediaan tenaga listrik. Dilain pihak, penyediaan tenaga listrik yang bersifat padat modal dan teknologi menyebabkan harga tenaga listrik menjadi mahal dan belum dapat menjangkau seluruh wilayah indoensia. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong proses produksi dan distribusi yang lebih merata dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu campur tangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam sektor kelistrikan adalah keterlibatan nya dalam penentuan tarif listrik.

Berdasarkan Undang - Undang 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Selama ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi listrik tersebut bagi pelanggan yang sebagian besar (sekitar 85 persen) adalah golongan R1-450 VA dan R1-900 VA.

Pemerintah memberikan subsidi listrik kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat pun senang dengan adanya pemberian subsidi listrik ini. Saat ini banyak bermunculan di media mengenai subsidi listrik akan dicabut pada tahun 2017. Jika benar subsidi listrik akan di hapuskan, dapat dibayangkan banyak sekali masyarakat yang akan mengeluh. Mungkin saja masyarakat melakukan penolakan massa agar subsidi listrik tidak dicabut.

PT PLN Persero mempunyai banyak sekali unit di Indonesia. Setiap Unit memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Setiap unit tidaklah sama peruntukan nya. Misalnya saja unit yang bertanggung jawab pada pelayanan publik, selain itu unit yang bertanggung jawab pada tranmisi, atau unit yang bertanggung jawab pada distribusi dan sebagainya. Salah satu unit yang bertanggung jawab pada pelayanan publik di kabupaten Mandau yaitu PT PLN Persero Rayon Duri.

PT PLN Persero Rayon Duri merupakan perusahaan yang berada di Kabupaten mandau. PT PLN Persero Rayon Duri memiliki suatu divisi yang peduli pada masyarakat sekitar nya. Mendengar issu bahwa subsidi listrik akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicabut pada tahun 2017 pasti nya PT PLN Persero Rayon Duri tidak akan tinggal diam menanggapi isu tersebut karena sudah terdengar keluhan-keluhan dari masyarakat.

Subsidi diberikan dengan tujuan agar ketersediaan listrik dapat terpenuhi, kelangsungan penyediaan listrik dapat berjalan stabil, serta membantu pelanggan yang kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PT PLN Persero, selanjutnya di sebut PLN, dapat ikut menikmati energi listrik. Namun demikian ada satu pertanyaan klasik yang sering muncul berkaitan pemberian subsidi ini yaitu apakah subsidi tersebut telah membantu masyarakat miskin karena sampai saat ini subsidi diberikan kepada hampir semua pelanggan PLN. Selain itu, subsidi listrik juga ditenggarai lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga kaya. Ini disebabkan kebijakan subsidi listrik saat ini adalah subsidi harga, sehingga semakin besar jumlah konsumsi listriknya semakin besar juga jumlah subsidi listrik yang dinikmati.

Berdasarkan hasil evaluasi BKF dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit /German International Cooperation (GIZ) terhadap subsidi listrik yang diberikan kepada kelompok pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA yang berlaku saat ini menunjukkan subsidi listrik tidak tepat sasaran, karena 5,9 juta pelanggan R1-450 VA dan 14,4 juta pelanggan R1-900 VA adalah kelompok rumah tangga yang telah mampu karena termasuk dalam pengeluaran per kapita lebih dari Rp1 juta per bulan (Susenas, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPS memiliki 2 jenis data, yaitu mikro dan makro. Sedangkan data yang digunakan sebagai acuan untuk penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin adalah data mikro.

Tabel 1.1
14 Kriteria Miskin Menurut BPS

NO	Variabel Kemiskinan	Kriteria Miskin
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² per orang
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/bambu/Kayu Murah
3	Jenis bangunan tempat tinggal	Bambu/Rumbia/Kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester
4	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya/ bersama rumah tangga lain
5	Sumber Penerangan rumah tangga	Bukan listrik
6	Sumber Air minum	Sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar memasak sehari-hari	Kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/ayam/susu per minggu	Tidak pernah/satu sekali seminggu
9	Pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun	Tidak membeli satu/satu stel
10	Frekuensi makan setiap hari untuk setiap anggota	Satu kali /dua kali sehari
11	Kemampuan membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak mampu berobat
12	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Petani gurem/tidak bekerja
13	Pendidikan tertinggi kepala keluarga	Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Kepemilikan aset (Sepeda motor, TV, tabungan, ternak)	Tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga tersebut di kategorikan tidak mampu atau miskin. Namun fakta nya banyak rumah tangga yang belum memenuhi 9 variabel standart dari BPS tetapi mendapatkan subsidi listrik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selain belum tepat sasaran, pola subsidi listrik bagi pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA juga dinilai belum memenuhi prinsip keadilan, karena kelompok pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA yang lebih mampu mendapat subsidi lebih banyak dibandingkan kelompok yang tidak mampu. Hasil pengolahan lebih lanjut dengan data Susenas (2014) menunjukkan golongan pengeluaran yang lebih tinggi justru menerima subsidi listrik per bulan yang lebih tinggi.

Sebagai contoh misalnya, kelompok pelanggan R1-450 VA dengan pengeluaran terendah menerima subsidi dengan rata-rata sebesar Rp48.710/bulan, sedangkan kelompok dengan pengeluaran tertinggi dari pelanggan R1-450 VA telah menerima subsidi rata-rata sebesar Rp140.835/bulan, hampir 3 kali lipat dari besaran subsidi yang diterima oleh kelompok yang memiliki pengeluaran terkecil. Perbedaan ini akan semakin jauh jika dibandingkan dengan kelompok rumah tangga miskin lainnya yang belum mempunyai akses listrik PLN sehingga mereka sama sekali tidak menikmati subsidi listrik.

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI pada saat pembahasan rancangan anggaran subsidi listrik dalam APBN TA 2017. Rumah tangga miskin dan tidak mampu tersebut mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data tersebut adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 4 November 2015, Presiden memutuskan untuk melakukan pembenahan subsidi listrik secara bertahap.

Presiden menginstruksikan agar pembenahan tersebut dilakukan setelah dilakukan pencocokan data antara konsumen rumah tangga daya 900 VA dengan data rumah tangga yang terdapat dalam Data Terpadu.

Tingkat kemiskinan di kabupaten Bengkalis kini mencapai 7,05 persen. Angka ini masih cukup fluktuatif. Angka kemiskinan pada akhir pengesahan peraturan Daerah (Perda) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017 pada desember 2016 lalu tercatat, mencapai 7,35 % naik dari tahun 2015 lalu sebesar 6,98 % dari jumlah penduduk kabupaten bengkalis mencapai 522,431 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kabupaten Bengkalis

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
Mandau	1.456	3.094	837	826	6.213
Pinggir	1.107	1.669	326	269	3.371
Bukit Batu	743	1.489	297	233	2.763
Siak Kecil	699	1.014	142	79	1.934
Rupat	1.780	1.693	253	136	3.862
Rupat Utara	689	511	56	53	1.309
Bengkalis	2.011	2.518	503	372	5.404
Bantan	1.736	1.924	319	209	4.188
Total	10.221	13.912	2.733	2.177	29,043

Sumber: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga menurut status sekejahteraan Kecamatan Mandau memiliki jumlah paling tinggi yaitu 6.213. Desil 1 rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di indonesia, desil 2 rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan di atas 10 % sampai 20% terendah di indonesia. Desil 3 rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan diatas 20% sampai 30% terendah di indonesia. Dan desil 4 rumah

tangga dengan kondisi kesejahteraan diatas 30% sampai dengan 40% terendah di indonesia.

Kecamatan Mandau merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Terdiri dari (15) kelurahan , Kelurahan Air Jamban merupakan kelurahan yang memiliki jumlah RT terbanyak yaitu 115 RT dan sebanyak 12,122 KK. Di Kecamatan Mandau Sebanyak 10.349 pelanggan yang berhak mendapat subsidi sedangkan di kelurahan Air Jamban sebanyak 610 pelanggan dan sudah sesuai dengan Data terpadu program penanganan fakir miskin yang dikelola oleh kementerian sosial dan Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

Tabel 1.3
Pelanggan Subsidi di Kecamatan Mandau Tahun 2015-2017

DAYA	2015	2016	2017
450 V	64	195	780
900 V	107	89	187
Jumlah	171	284	967

Sumber: PT PLN Persero Duri

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan penerima subsidi listrik di kecamatan mandau pada tahun 2015-2017 terus meningkat. Dan pada tahun 2017 pelanggan penerima subsidi bertambah sebanyak 967 yang terbagi menjadi 780 pelanggan dari daya 450 V dan sebanyak 187 dari pelanggan daya 900 V.

Pelanggan listrik 900 VA yang dicabut subsidi listrik nya akan mengalami penyesuaian listrik, dan secara bertahap harus membayar sesuai tarif normal. Ketidaktahuan masyarakat dan kurang nya sosialisasi tentang Mekanisme Pengaduan bagi pelanggan miskin yang dicabut subsidinya membuat masyarakat

pasrah. Dan kurang nya informasi yang menyebabkan masyarakat tidak memahami prosedur untuk melakukan pengaduan tersebut. Selain kurangnya pengetahuan masyarakat, pemerintah juga tidak serius untuk mensosialisasikan Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Ketidaktahuan ini dikarenakan keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses informasi di internet dan media sosial tentang perkembangan dari kebijakan subsidi listrik.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan yang menyatakan bahwa ada banyak masyarakat mampu yang mendapatkan subsidi listrik. Hal tersebut tidaklah menjadi sebuah tujuan dari tujuan subsidi listrik tersebut karena tujuan dari subsidi listrik adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sehingga di duga subsidi listrik itu tidak tepat sasaran.

Peneliti menemukan fenomena -fenomena sebagai berikut : 1) Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik tepat sasaran yang dibuat, khususnya di kecamatan mandau masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum mendapatkan subsidi listrik. 2) Masih rendah nya kesadaran pemerintah desa dan PT PLN dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dari berbagai pemaparan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU (STUDI KELURAHAN AIR JAMBA KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka Penelitian ini difokuskan di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu (Studi Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) ?
- b. Apa Kendala dalam Mengimplementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu (Studi Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu (Studi Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu (Studi Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang Administrasi Negara.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial maupun Mahasiswa yang membutuhkannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori, penjelasan tentang subsidi listrik tepat sasaran rumah tangga tidak mampu, konsep islam tentang unsur pelaksana kebijakan, definisi konsep, indikator penelitian, dan kerangka pemikiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini di uraikan beberapa diantaranya, lokasi dan waktu penelitian, jenis sumber dan data, informan penelitian, dan metode analisis.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang keadaan geografi kecamatan Mandau dan lokasi penelitian.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

BAB VI

: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.